

**REPRESENTASI TRAGEDI GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965  
DALAM NOVEL KUBAH DAN RONGGENG DUKUH PARUK  
KARYA AHMAD TOHARI**

**Jasril\*<sup>1</sup>, Asmawati<sup>2</sup>**

**Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP YDB Lubuk Alung**

**\*Correspondence email: [jasrilpiliang2000@gmail.com](mailto:jasrilpiliang2000@gmail.com)**

*Abstract*

*This study aims to describe the representation of the September 30, 1965 Movement tragedy in the novels Kubah and Ronggeng Dukuh Paruk by Ahmad Tohari. The research employs a qualitative descriptive method, with data consisting of words, sentences, and discourses containing references to the September 30, 1965 tragedy, sourced from Kubah (2013) and Ronggeng Dukuh Paruk (2015). Data collection was conducted using the observation-reading-note technique, and analysis was carried out through content analysis using heuristic and hermeneutic reading methods, interpreted through the lens of New Historicism theory. The findings reveal that: (1) Kubah and Ronggeng Dukuh Paruk highlight the September 30, 1965 Movement as a central theme, (2) the protagonists in both novels are individuals who became victims of the September 30, 1965 events, (3) the involvement of the protagonists in the Communist Party of Indonesia (PKI) was influenced by the strong presence of PKI cadres within society, and (4) the suppression of the September 30, 1965 Movement by the New Order government resulted in numerous casualties, not only among those involved with or sympathetic to the PKI but also among those who were completely uninformed about the party.*

**Keywords:** *1965 tragedy, Kubah and Ronggeng Dukuh Paruk novels, sociology of literature*

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP YDB Lubuk Alung

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP YDB Lubuk Alung

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 18—19 April 2016 diadakan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui pendekatan sejarah yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta (Kuma, 2018). Simposium ini dihadiri oleh para penyintas tragedi 1965, sejarawan, mantan jenderal TNI, serta berbagai tokoh dari lembaga yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui penyelenggaraan simposium ini, pemerintah berharap konflik dapat diselesaikan dan trauma masa lalu dapat dipulihkan. Selain itu, peristiwa 1965 diharapkan dapat ditempatkan secara tepat dalam perspektif sejarah (Kuma, 2018). Tragedi 1965 diduga menelan korban ratusan ribu orang dalam kaitannya dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia, entah terbunuh oleh aparat dalam proses penumpasan atau meninggal di pulau buangan (Pulau Buru) (Februana, 2002; Pambudi and Suhanti, 2017; Adam, 2018). Selain itu, anak-anak mantan pelaku atau “digetahu” sebagai pelaku gerakan 30 September 1965 menerima dampak buruk dalam bentuk stigma negatif sebagai anak PKI (Ahmad, 2013; Setyagama, 2015; Sinurat and Dermawan, 2023).

Adanya simposium ini merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintah dalam rangka “menyembuhkan” luka sejarah. Peristiwa ini tentu tidak akan terjadi bila yang berkuasa di negeri ini masih rezim Orde Baru. Soeharto dan rezim Orde Baru berupaya menanamkan pemahaman bahwa peristiwa Gerakan 30 September 1965 hanya berpusat pada G30S/PKI. Mereka membentuk kerangka berpikir yang membagi secara tegas antara pahlawan dan pengkhianat. Dalam perspektif Orde Baru, tragedi 1965 hanya sebatas pada pembunuhan enam jenderal, seorang perwira, serta Ade Irma Suryani Nasution (putri Jenderal Nasution) dalam peristiwa G30S dan penyiksaan di Lubang Buaya. Sementara itu, dua tragedi kemanusiaan lainnya—

pembantaian massal terhadap kelompok komunis pasca-G30S dan pembuangan mereka ke Pulau Buru—tidak dianggap sebagai tragedi kemanusiaan dan bahkan dihapus dari buku teks Sejarah Nasional Indonesia. Pembunuhan massal, penyiksaan, pembuangan kaum komunis, serta pemberian stigma sebagai “eks-tahanan” (ET) dan “organisasi terlarang” (OT) oleh penguasa Orde Baru dianggap sebagai sesuatu yang wajar, pantas, atau bahkan sejalan dengan kehendak ilahi.

Selama masa kepemimpinannya, Soeharto, dengan dukungan kaum intelektual yang berpihak kepadanya, terus-menerus menanamkan doktrin kebencian terhadap segala hal yang berhubungan dengan PKI. Bersamaan dengan itu, ia juga mengajarkan narasi bahwa tindakan militer terhadap kelompok komunis adalah sesuatu yang benar. Masyarakat Indonesia diajarkan untuk selalu waspada, merasa takut, dan membenci PKI yang digambarkan sebagai ancaman. Akibatnya, tragedi pembantaian massal tahun 1965 nyaris terhapus dari ingatan kolektif bangsa Indonesia dan hampir tidak menjadi perhatian masyarakat dunia (Taum, 2014). Selain itu, peristiwa ini juga jarang sekali disebut dalam buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah selama era Orde Baru (Adam, 2004; Hoadley, 2005; Widodo, 2011). Hilangnya peristiwa pembunuhan massal tahun 1965 dalam ingatan orang Indonesia mengindikasikan bahwa penulisan sejarah peristiwa 30 September 1965 penuh dengan dramatisasi yang menunjukkan kehebatan penguasa Orde Baru dalam pemberantasan pengaruh komunisme dan bahayanya terhadap kehidupan bangsa Indonesia (Julianno, 2024). Di bawah rezim Orde Baru yang dipenuhi ketakutan terhadap PKI, sastra Indonesia memberikan ruang atau sudut pandang untuk memahami nasib para korban PKI dari perspektif kemanusiaan (Luthfi, 2018).

Ahmad Tohari merupakan salah seorang sastrawan Indonesia yang berani mengangkat tema besar Tragedi 1965 dalam karya-karyanya selama masa kekuasaan rezim otoriter Orde Baru. Dalam karyanya, ia menyampaikan pandangan pribadinya terhadap peristiwa tragis tersebut. Tema ini hampir tidak tersentuh dalam dunia sastra karena dianggap tabu, mengingat "kebenaran" tentang peristiwa tersebut diawasi secara ketat oleh rezim militer yang berkuasa. Menurut Heryanto (1998), kesusastraan Indonesia Mutakhir (1970—1980) cenderung bersifat apolitis, sebagai salah satu tindakan menghindari pemerintah yang represif terhadap sikap politik tertentu, khususnya yang bersifat menentang kebijakan politik pemerintah. Namun, bagi Ahmad Tohari kebenaran itu harus di sampaikan meskipun dengan cara yang lebih humanis.

Seorang pengarang merekonstruksi peristiwa dengan cara yang berbeda dari penyampaian sejarah (Sungkowati, 2009; Affandi, 2018; Murtini, Wiranta and Prasoj, 2019). Hal ini dilakukan untuk mengelabui sensor penguasa yang menghendaki peristiwa itu dipetieskan. Oleh sebab itu, penyampaian kebenaran suatu peristiwa dalam sastra perlu dilakukan karena kebenaran dalam sejarah seringkali di manipulasi oleh penguasa guna melanggengkan kekuasaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ajidarma (2010), kebenaran karya sastra tidak akan bisa dilunturkan, karena kebenaran dalam karya sastra merupakan bentuk perlawanan terhadap historisme, yaitu sejarah yang dikonstruksi semata-mata untuk membenarkan kekuasaan. Dengan demikian, pengkajian terhadap karya sastra dapat digunakan untuk melihat keadaan masyarakat yang terungkap dalamnya (Yunita and Sugiarti, 2020; Asmawati, Ulya and Jasril, 2023; J Jasril, Laspida Harti and Desi Fitria, 2024). Hubungan antara karya sastra dan realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman terhadap karya sastra memerlukan kajian yang mempertimbangkan keterkaitannya dengan aspek-aspek sosial

(Bahtiar, 2018; HW, 2021; Nurkamila, Aprilliah and Hartati, 2021), (Yolanda, Afif Rofii, 2024). Harris Effendi Thahar dalam disertasinya di Universitas Negeri Jakarta (2006) menyimpulkan bahwa tema-tema kekerasan yang terdapat dalam kumpulan cerpen koran pilihan *Kompas* 1992—1999 adalah refleksi (pantulan) dari situasi sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya pada masa kelahiran cerpen-cerpen tersebut (Thahar, 2006). Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penggambaran tragedi gerakan 30 September 1965 dalam novel *Kubah* dan *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari.

#### **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Datanya berupa kata-kata, kalimat, dan wacana yang mengandung tragedi 30 September 1965 yang bersumber dari novel *Kubah* (2013) dan *Ronggeng Dukuh Paruk* (2015) karya Ahmad Tohari. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi-baca-catat, dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan metode pembacaan heuristik dan hermeneutik serta diinterpretasikan dengan teori *new historicism*. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan untuk memastikan validasi data melalui triangulasi dengan berbagai sumber (Moleong, 2002).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Novel *Kubah* dan *Ronggeng Dukuh Paruk* Bertemakan Gerakan 30 September 1965**

Berdasarkan penelaahan terhadap novel *Kubah* dan *Ronggeng Dukuh Paruk*, dapat dipahami bahwa kedua novel ini mengangkat tema tentang tragedi gerakan 30 September 1965. Dalam novel *Kubah*, tragedi gerakan 30 September 1965 digambarkan dalam kenangan Karman ketika perjalanan pulang dari pulau Buru setelah menjalani hukuman sebagai tahanan politik selama 12 tahun. Karman datang ke Pegaten dan menemukan banyak perubahan yang sudah sudah terjadi

di Pegaten dari 12 tahun yang lalu ketika dia belum di tahan sebagai tahanan politik di Pulau Buru. Dalam perjalanan pulang ke Pegaten, dalam ingatan Karman muncul kembali kilasan-kilasan masa lalu awal dia masuk ke dalam kelompok PKI.

*... Dua belas tahun yang lalu suasana tak seramai itu. Mobil-mobil, sepeda motor, dan kendaraan lain saling berlari serabutan. Anak-anak sekolah membentuk kelompok-kelompok di atas sepeda masing-masing. Mereka bergurau sambil mengayuh sepeda. Dan semua bersepatu dan berpakaian baik, sangat berbeda dengan keadaan ketika Karman belum terbuang selama dua belas tahun di Pulau B. (Kubah, hlm. 8)*

Dalam perjalanan pulang Karman berhenti di alun-alun kota samba terus memegang selebar surat pembebasannya sebagai tahanan. Karman merasa dirinya tidak lebih berharga dari selebar surat itu. Seluruh totalitas dirinya tersimpan dalam selebar surat itu. Oleh sebab itu, setelah sampai di Pegaten, sesuai perintah dari Pulau Buru, Karman harus melapor ke Kodim sambil memeperlihatkan surat "sakti" itu. Pelaporan kepada Kodim memperlihatkan bahwa kepulauan Karman pada masa kekuasaan Orde Baru yang militeristik.

Sementara itu, tema gerakan 30 September yang diangkat dalam novel *Ronggeng Dukuh Paruk* terlihat ketika Srintil dan Kartareja mendatangi kantor polisi. Mereka meminta perlindungan dari orang-orang yang mengepung Dukuh Paruk. Melihat kedatangan Srintil dan Kartareja anggota kepolisian dan tentara yang ada di kantor itu tercengang. Mereka tidak menduga bahwa di momen genting tersebut, dua orang yang kerap terlihat bersama Bakar tiba-tiba muncul di kantor polisi. Komandan polisi gelisah, dia kemudian menanyakan apakah

benar dua orang yang datang itu namanya tercantum dalam daftar. Kemudian diputuskan untuk menahan Srintil dan Kartareja.

*"...Bahwa Saudara Kartareja dan Saudara Srintil termasuk orang-orang yang harus kami tahan. Ini perintah atasan. Dan kami hanya melaksanakan tugas."*

#### **b. Tokoh Utama dalam Novel Merupakan Merupakan Orang-orang yang Jadi Korban Gerakan 30 September 1965**

Kedekatan Karman sebagai tokoh utama novel *Kubah* dengan orang-orang partai komunis berawal dari pencarian eksistensi diri yang dilakukan oleh Karman. Setelah menamatkan pendidikan SMP, Paman Hasyim tidak mampu lagi membiayai pendidikan Karman yang jenjang yang lebih tinggi. Beliau pun menyarankan Karman untuk mencari pekerjaan agar bias membiayai kelanjutan pendidikannya. Melihat kondisi Karman yang masih labil itu, datang rasa iba dalam diri Paman Hasyim.

Pengaruh keluarga dan lingkungan, tempat Karman dibesarkan, turut berperan dalam pembentukan watak dasar dan kepribadiannya. Akan tetapi belum sepenuhnya berhasil meyakinkan Karman akan eksistensi dirinya. Karena itu, ketika golongan PKI membujuknya ia langsung masuk. Di sini, Karman seolah-olah menemukan eksistensi dirinya, padahal sebenarnya dengan masuk ke golongan PKI justru ia telah melepaskan akar eksistensinya. Ia tidak lagi mempunyai kebebasan. Pola berpikir dan tindak-tanduknya selalu diboncengi kepentingan politik. Sejak itu muncul semacam dakwah yang berbau eksistensialisme.

Dalam novel *Ronggeng Dukuh Paruk*, diceritakan bahwa paham komunis mulai masuk ke Dukuh Paruk melalui Pak Ranu,

seorang pegawai kantor kecamatan. Ia datang ke Dukuh Paruk untuk mengundang Srintil dan kelompok ronggengnya agar tampil dalam perayaan Agustusan. Awalnya, Srintil tidak tertarik untuk memenuhi undangan tersebut, tetapi akhirnya ia setuju. Ternyata, perayaan Agustusan itu bukan sekadar peringatan hari kemerdekaan, melainkan juga menjadi ajang propaganda politik. Salah satu panitia bahkan memberikan secarik kertas berisi daftar lagu beserta liriknya. Lagu-lagu tersebut sebenarnya sudah akrab bagi mereka, tetapi beberapa bagian telah dimodifikasi dengan menambahkan kata *rakyat* dan *revolusi*.

*“Srintil menapaki tangga panggung dengan iringan tepuk tangan yang riuh. Dari sudut tertentu terdengar paduan teriakan slogan politik. “Hidup kesenian rakyat!” (Ronggeng Dukuh Paruk, hlm. 187).*

Dalam pertunjukan pada bulan Agustus itu, rombongan ronggeng Srintil yang sebelumnya hanya dikenal sebagai Ronggeng dari Dukuh Paruk, mendadak disebut sebagai ronggeng rakyat. Tanpa disadari atau diinginkan oleh mereka, kelompok Ronggeng Dukuh Paruk pun mulai mengambil langkah kecil yang tak terhindarkan menuju kedekatan dengan kelompok merah—kelompok yang mengklaim sebagai pembela rakyat tertindas, yaitu kaum Komunis. Namun, pada akhir tahun 1965, kedekatan ini justru membawa malapetaka bagi mereka.

### **c. Keterlibatan Tokoh Utama Ke dalam Kelompok PKI Disebabkan oleh Kepiawaian Orang-orang PKI dalam Perekrutan Kader**

Tokoh utama dalam novel *Kubah* adalah Karman, anak seorang matri pasar. Pak Mantri terbunuh oleh tentara republik masa perang kemerdekaan karena dianggap memihak Belanda. Sepeninggal ayahnya,

Karman di besarkan oleh ibunya bersama adik perempuannya. Karena kesulitan ekonomi Karman di besarkan oleh Haji Bakir. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, banyak lascar Hizbullah yang meletakan senjata. Mereka kembali ke kampung masing-masing. Di antara yang pulang itu adalah Hasyim, adik Bu Mantri. Kemudian Hasyim berbicara kepada Haji Bakir untuk meminta Karman kembali dan menyekolahkan ke SMP. Setelah taman SMP paman, Hasyim tidak memiliki uang untuk melanjutkan sekolah Karman, dia menyarankan agar Karman mencari pekerjaan untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan bermodalkan ijazah SMP, sangat sulit bagi Karman untuk mencari pekerjaan, beruntung Haji Bakir mau memberinya kesibukan mengantar truk-truk kelapa ke pabrik. Bagi Karman, bukan mengantar truk itu yang disukainya, tetapi bisa bertemu dengan Rifah, anak gadis Haji Bakir, yang membuat Karman bahagia.

Dalam kondisi Karman menanggung itu, datanglah Trimman menemui paman Hasyim, dia menawarkan bantuan untuk memasukan Karman menjadi sekretaris di kecamatan. Paman Hasyim sangat berterima kasih akan tawaran Trimman, sebab dia tahu bahwa Trimman merupakan orang yang berpengaruh di kantor kecamatan. Sementara, Trimman, Margo, dan teman-temannya melihat bahwa Karman merupakan orang yang layak direkrut sebagai kader PKI. Trimman, Margo, dan kawan-kawannya adalah kader PKI yang lolos dari penumpasan pemberontakan PKI di Madiun 1948. Trimman bekerja sebagai kepala kantor penerangan kecamatan, sekaligus merangkap sebagai ketua partai Partindo. sementara, Margo adalah seorang guru di Pegaten. Karman adalah bekas murid Margo, oleh sebab itu dia mengetahui luar dalam tentang Karman, dan dialah yang menyuruh Trimman menemui paman Hasyim untuk menawarkan Karman masuk bekerja di kantor kecamatan.

“Ya, tentu saja berusaha menanamkan jasa kepada dia. Sudah saya laporkan saat ini Karman sangat membutuhkan pekerjaan. Apabila dia bisa menjadi pegawai atas bantuan kita, maka perkenalan dia dengan kita berlangsung sangat wajar dan mulus. (Kubah, hlm. 79)

Setelah melihat bahwa ada peluang untuk Karman, mereka menyuruh Karman melamar. Selama persiapan tes, Trimman datang mengunjungi Karman untuk member nasihat dan brosur-brosur partai yang tidak ada hubungannya dengan tes yang akan diikuti Karman. Ketika dilakukan tes, Karman sengaja tidak diluluskan, walaupun sebenarnya dia lulus. Hal ini dilakukan Trimman dan kawan-kawannya untuk memperpanjang waktu membina Karman menjadi kader yang handal.

Tokoh utama dalam novel *Ronggeng Dukuh Paruk* adalah Srintil, seorang penari ronggeng yang berasal dari desa Dukuh Paruk. Keterlibatan Srintil dalam kelompok PKI berawal dari kedatangan Pak Ranu yang meminta Srintil meronggeng dalam acara Agustusan. Cara yang digunakan oleh Pak Ranu pada awalnya dengan bujukan, namun ditolak oleh Srintil. Namun pada akhirnya Srintil mengikuti ajakan Pak Ranu karena desakan teman-temannya yang kebanyakan dapurnya berasal dari kegiatan meronggeng. Ketika sudah mengiyakan akan meronggeng dalam acara Agustusan, sesungguhnya Srintil dan kelompok orang Dukuh Paruk, telah menjadi kader baru komunis. Ajakan meronggeng, merupakan jebakan, sebab orang-orang akan mencap kelompok Ronggeng Srintil sebagai kelompok ronggeng rakyat.

Pada saat musim paceklik melanda pada tahun 1948, kelompok ronggeng Dukuh Paruk sering menggelar pertunjukan. Bakar, seorang pria yang dikenal dengan pidatonya yang berapi-api, kerap mengundang Srintil

untuk menari di tengah rapat umum, baik siang maupun malam. Namun, Bakar tidak menggunakan kemampuannya berorasi di dusun tersebut. Sebaliknya, ia memanfaatkan Srintil dan kelompoknya sebagai daya tarik untuk menarik massa. Dalam upayanya itu, Bakar berhasil menjadikan Srintil dan teman-temannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya.

#### **d. Penumpasan Gerakan 30 September 1965 Memakan Banyak Korban, Bukan Hanya Korban Orang-Orang yang Terlibat atau Simpatisan PKI, Melainkan Juga Orang-Orang yang Tidak Terlibat PKI**

Menurut Adam (2009), Pemerintahan Orde Baru mulai terbentuk pada 1 Oktober 1965, ketika Pangkostrad Mayjen Soeharto mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan memimpin operasi untuk menumpas para pelaku Gerakan 30 September. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung dan Kolonel Abdul Latief, yang saat itu tergabung dalam Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Cakrabirawa serta sebelumnya pernah menjadi bawahan Soeharto di Kodam Diponegoro.

Sehari setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno, Soeharto segera mengeluarkan keputusan yang menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang (Endrayani and Suharman, 2021) (Adriyanto, 2016). Surat dengan nomor 1/3/1966 tersebut ditandatangani oleh Letjen Soeharto pada 12 Maret 1966 atas nama Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Mandataris MPRS, serta Pemimpin Besar Revolusi (Samsudin, 2005; Setyagama, 2015; Permata, 2016). Pada 5 Juli 1966, Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menerbitkan TAP MPRS RI No. XXV/MPRS/1966, yang memutuskan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Keputusan ini juga menyatakan bahwa PKI adalah organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia serta melarang segala

bentuk aktivitas yang bertujuan menyebarkan atau mengembangkan paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme (Samsudin, 2005; Adriyanto, 2016; Latifah and Putra, 2020). Soeharto menjadikan kedua peraturan tersebut sebagai "landasan hukum" untuk memberantas orang-orang yang terafiliasi dengan PKI.

Soeharto membantai orang-orang PKI dan orang-orang yang "disangkakan" sebagai kelompok PKI (Sumawiharja, 2024). Kondisi ini dapat dilihat dari kali Sikura dalam novel *Kubah* yang airnya berubah menjadi merah berbau anyir. Pembantaian terhadap orang-orang PKI ini merupakan langkah Soeharto menuju tampuk kekuasaannya.

*"Maksud Pak Karman, mungkin banyak mayat yang mengendap di dasar lubuk?" (Kubah, hlm. 155)*

Cara lain yang dilakukan oleh Soeharto untuk menekan orang-orang PKI adalah dengan menangkapi orang-orang yang pernah ikut kegiatan PKI (Prawiratama, 2013; Munsu, 2016). Hal ini yang dialami oleh Srintil, yang pernah menjadi ronggeng dalam pertunjukkan yang diadakan oleh kelompok Pak Ranu. Penekanan kepada orang-orang PKI dilakukan oleh Soeharto dengan tujuan melanggengkan kekuasaannya yang dilakukan empat cara, yaitu mengurangi pesaingnya di Angkatan Darat seperti Ahmad Yani, membubarkan PKI yang selama ini menjadi rival utama militer, melemahkan kelompok pendukung Bung Karno dengan menangkap 15 menteri pro-Soekarno, serta mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno (Adam, 2009). Aplikasi dari cara Soeharto tersebut terlihat dari penangkapan orang-orang yang "dianggap" kelompok PKI seperti yang dialami oleh Srintil dan Kartareja, serta orang-orang Dukuh Paruk lainnya.

*"Aku akan pergi ke kantor polisi!" Kata Srintil tiba-tiba.  
"Aku akan bertanya kepada mereka apa kesalahan kita."*

*(Ronggeng Dukuh Paruk, hlm. 239)*

*Sebagai ronggeng, Srintil tidak merasa memiliki kesalahan, sebab dia hanya peronggeng yang dating bila diundang oleh orang yang mengadakan acara.*

*... siang itu Dukuh Paruk yang bodoh dan melarat tidak berbuat apa-apa, ketika Sakarya, Nyai Kartareja, Sakum, dan dua orang lainnya di bawa oleh petugas keamanan. Mereka di gabungkan dengan Srintil dan Kartareja dalam tahanan....  
(Ronggeng Dukuh Paruk, hlm. 242)*

Berdasarkan uraian di atas, analisis yang terjadi di alam nyata yang dikemukakan oleh Asvi Warman Adam, juga ditemukan dalam karya sastra. Menurut Asri (2011), karya sastra merupakan gambaran pencerminan realitas sosial budaya masyarakatnya. Apa yang terjadi di alam nyata, juga dapat ditemukan dalam karya sastra (Andalas, 2017; Wahyuni, 2019; Sabila and Fathurohman, 2022). Perbedaannya, karya sastra tidak hanya menyoroti elite politik yang hampir setiap hari muncul di halaman surat kabar, tetapi juga menggambarkan kehidupan rakyat kecil yang merasakan dampak langsung dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Orang-orang kecil ini sering dilupakan dan tidak tercatat dalam buku sejarah. Barangkali disinilah letak sisi humanisnya sebuah karya sastra yang tidak membedakan-bedakan manusia (Jasril, 2017; Silfina, Hartati and Jasril, 2022).

## SIMPULAN

Karya sastra memiliki fungsi yang sangat strategis bagi pembacanya. Novel *Kubah* dan *Ronggeng Dukuh Paruk* diciptakan oleh Ahmad Tohari bukan semata-mata untuk menghibur pembacanya, melainkan representasi pengungkapan fakta

yang selama ini sengaja “disembunyikan” oleh penguasa. Fakta yang ingin diungkapkan oleh Ahmad Tohari adalah fakta yang berkaitan dengan peristiwa 1965. Namun, fakta yang disajikan tidak hanya berfokus pada para elite politik yang kerap muncul di halaman surat kabar setiap hari, tetapi juga pada rakyat kecil yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah. Sayangnya, pengalaman mereka sering kali tidak terdokumentasikan dalam buku sejarah.

Bila buku sejarah menyajikan fakta-fakta, karya sastra dapat melengkapinya dengan memberikan kehidupan melalui emosi dan pemikiran para korban maupun pelaku peristiwa. Meskipun gambaran tersebut merupakan hasil rekayasa, sastra mampu menghadirkan kembali pengalaman batin mereka, meski tidak secara pasti merefleksikan perasaan dan pikiran di masa lalu. Karman dalam perjalanan pulang dari Pulau Buru, setelah 12 tahun menjalani hukuman, menyadari bahwa tidak memiliki apapun termasuk Marni yang dulu dicintainya sudah menikah dengan orang lain karena kesalahannya pada masa lalu. Begitu juga dengan Srintil yang tidak mengerti tentang politik dan gerakan, ikut tertangkap karena pernah jadi penari dalam kegiatan 17 Agustus yang diadakan oleh kelompok PKI. Dengan memahami karya sastra dalam kaitannya dengan realitas sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat, seorang pembaca sastra berpotensi menemukan kembali jejak realitas sejarah. Novel *Kubah* dan *Ronggeng Dukuh Paruk* menyampaikan pesan kepada pembacanya tentang luka dan kesalahan di masa lalu, agar generasi saat ini tidak mengulanginya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. W. (2004) *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: TriDe.
- Adam, A. W. (2009) *Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*. Jakarta: Gramedia.
- Adam, A. W. (2018) ‘Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965. Archipel, 95, 11–30’. DOI: doi: <https://doi.org/10.4000/archipel.604>.
- Adriyanto, A. (2016) ‘Kontroversi Keterlibatan Soeharto dalam Penumpasan G30S/PKI 1965’, *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 2(2), pp. 1–12. doi: DOI: <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v2i2.1591>.
- Affandi, C. M. (2018) ‘Reinterprestasi Peristiwa Sejarah dan Tokoh Kartosoewirjo dalam Kumpulan Puisi Kematian Kecil Kartosoewirjo Karya Triyanto Triwikromo: Kajian New Historicism’, *Universitas Airlangga*.
- Ahmad, T. (2013) ‘Eks Tapol PKI dan Kontrol Pemerintah: Studi pada Komunitas Tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003)’, *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 5(3), pp. 417–430.
- Ajidarma, S. G. (2010) *Trilogi Insiden: Saksi Mata, Jazz Parfum & Insiden, dan Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara*. Yogyakarta: Bentang.
- Andalas, E. F. (2017) ‘Eskapisme Realitas dalam Dualisme Dunia Alice Telaah Psikologi-Sastra Film Alice in Wonderland (2010)’, *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 3(2), pp. 185–195. doi: DOI: <https://doi.org/10.22219/kembara.v3i2.5136>.
- Asmawati, A., Ulya, R. H. and Jasril, J. (2023) ‘A Sociological and Mimesis Studies on the Forms of Social Issues and Critique in Indonesian Novels’, *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(3), pp. 2674–2689. doi: DOI: <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i3.3159>.
- Asri, Y. (2011) ‘Analisis Sosiologis Cerpen “Si Padang” Karya Harris Effendi Thahar’, *Humaniora*, 23(3), pp. 245–

255. doi: DOI:  
<https://doi.org/10.22146/jh.1026>.
- Bahtiar, A. (2018) 'Konflik Agama dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari', *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 7(2), pp. 161–181. doi: <https://doi.org/10.26499/jentera.v7i2.683>.
- Endrayani, T. D. and Suharman, E. W. (2021) 'Peranan Jendral Suharto dalam Melahirkan Orde Baru Tahun 1965-1968', *Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 2(1).
- Febuana, N. (2002) *Tapol*. Media Pressindo.
- Heryanto, A. (1998) 'Masihkah Politik Jadi Panglima? Politik Kesusasteraan Indonesia Mutakhir', dalam *Jurnal Prisma No.8, Th. XVII. Jakarta: LP3ES*, 17, pp. 3–16.
- Hoadley, A.-G. N. (2005) *Indonesian Literature vs New Order Orthodoxy: The Aftermath of 1965-1966*. Copenhagen: Nias Press.
- HW, M. R. (2021) 'Pandemi dalam Cerpen-Cerpen Indonesia: Kajian Sosiologi Sastra', *SUAR BETANG*, 16(2), pp. 133–142. doi: DOI: <https://doi.org/10.26499/surbet.v16i2.238>.
- J Jasril, Laspida Harti, dan and Desi Fitria (2024) 'Pertarungan Jiwa Tokoh Utama Dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 2(7), pp. 165–175.
- Jasril, J. (2017) 'Penentangan Laki-Laki Minangkabau terhadap Budaya Minangkabau dalam Novel Hamka', *GENTA BAHTERA: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan*, 3(1), pp. 1–12. doi: DOI: <https://doi.org/10.47269/gb.v3i1.1>.
- Julianno, I. T. (2024) 'Noda Merah Kekuasaan Orde Baru dalam Cerpen "Mei Hwa" Karya Gunawan Budi Susanto', *Sintesis*, 18(1), pp. 15–37.
- Kuma, R. T. G. D. (2018) 'Pembingkaian Media Online Tentang Korban pada Simposium Nasional Tragedi 1965 (Analisis Framing Simposium Nasional Tragedi 1965 di Portal Online Kompas.com)'. UAJY.
- Latifah, S. and Putra, C. R. W. (2020) 'The Representation Of Power Hegemony In The Colonial and New Order Era In 'balada Supri' novel (Representasi Hegemoni Kekuasaan Pada Zaman Kolonial dan Orde Baru dalam Novel 'balada Supri')', *Leksema: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 5(1), pp. 65–82. doi: DOI: <https://doi.org/10.22515/ljbs.v5i1.2107>.
- Luthfi, A. N. (2018) 'Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca-1965 di Banyuwangi, Jawa Timur', *Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien*. Association Archipel, (95), pp. 53–86. doi: <https://doi.org/10.4000/archipel.624>.
- Moleong, L. J. (2002) 'Metodologi Penelitian Kualitatif'. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munsi, H. (2016) 'Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis', *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(1). doi: <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i1.998>.
- Murtini, M., Wiranta, W. and Prasojo, A. (2019) 'Fakta Sejarah dalam Novel-Novel Pandir Kelana', *Jurnal Sastra Indonesia*, 8(3), pp. 203–210.
- Nurkamila, N., Aprilliah, Y. D. and Hartati, D. (2021) 'Transformasi Novel Serendipity ke dalam Film Serendipity Karya Erisca Febriani: Kajian Sastra Bandingan', *Jurnal Hasta Wiyata*, 4(2), pp. 172–180. doi: DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.hastawiyata.2021.004.02.05>.
- Pambudi, K. S. and Suhanti, I. Y. (2017)

- 'Penelitian Studi Kasus Fenomenologi Persepsi Keadilan Pelaku Pembunuhan Anggota PKI 1965', *Jurnal Sains Psikologi*. State University of Malang, 6(1), pp. 22–30.
- Permata, H. (2016) 'Gerakan 30 September 1965 dalam Perspektif Filsafat Sejarah Marxisme', *Jurnal Filsafat*, 25(2), pp. 220–251. doi: <https://doi.org/10.22146/jf.12680>.
- Prawiratama, A. (2013) 'Bentuk Konflik dalam Kumpulan Cerpen Kembang-Kembang Genjer Karya Fransisca Ria Susanti', *Jurnal Sastra Indonesia*, 2(1).
- Sabila, G. and Fathurohman, I. (2022) 'Konflik Sosial dalam Novel Konspirasi Alam Semesta Karya Fiersa Besari Kajian Strukturalisme', *GERAM: Gerakan Aktif Menulis*, 10(1), pp. 1–9. doi: [https://doi.org/10.25299/geram.2022.vol10\(1\).7458](https://doi.org/10.25299/geram.2022.vol10(1).7458).
- Samsudin (2005) *Mengapa G 30 S/PKI Gagal?* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setyagama, A. (2015) 'Kebijakan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak-Hak Konstitusional Mantan Tapol Pki dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru', *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 3(1), pp. 29–38. doi: DOI: <https://doi.org/10.51747/ius.v3i1.391>.
- Silfina, M., Hartati, L. and Jasril, J. (2022) 'Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Bidadari Berbisik Karya Asma Nadia dan Implikasinya dalam Pembelajaran Teks Novel', *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran (KIBASP)*, 5(2), pp. 246–258.
- Sinurat, J. Y. and Dermawan, F. (2023) 'Diskriminasi Hak Terhadap Keturunan Eks Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI)', *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 4(1), pp. 529–543. doi: DOI: <https://doi.org/10.30998/je.v4i1.2117>.
- Sumawiharja, F. A. (2024) 'Pertanggungjawaban Negara Terhadap Eksil 1965 Pasca Orde Baru, Studi Viktimologi', *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1), pp. 23–38.
- Sungkowati, Y. (2009) 'Lintasan Sejarah Indonesia dalam Novel-novel Suparto Brata', *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 4(1). doi: DOI: <https://doi.org/10.18860/ling.v4i1.585>.
- Taum, Y. Y. (2014) 'Tragedi 1965 dalam Karya-Karya Umar Kayam: Perspektif Antonio Gramsci', *Sintesis*, 8(1), pp. 11–22.
- Thahar, H. E. (2006) *"Kekerasan dalam cerpen-cerpen Koran Pilihan Kompas 1992—1999: Suatu Tinjauan Struktural Genetik"*. (Disertasi). Jakarta: Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Tohari, A. (2013) *Kubah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tohari, A. (2015) *Ronggeng Dukuh Paruk*. Jakarta: Gramedia.
- Wahyuni, N. (2019) 'Kritik Sosial dalam Karya Sastra Bentuk Nyata Protes Sastrawan', *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran (KIBASP)*, 2(2), pp. 144–157.
- Widodo, T. (2011) 'Memahami Makna Praksis Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kontroversial', *Paramita: Historical Studies Journal*, 21(2). doi: DOI: <https://doi.org/10.15294/paramita.v21i2.1043>.
- Yolanda, Afif Rofii, U. W. (2024) 'Nilai Moral dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan Karya Agnes Davonar Tinjauan Psikologi Sastra', *Aksara: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(2), pp. 392–402.
- Yunita, G. F. R. and Sugiarti, S. (2020) 'Kajian Mitos dalam Novel Aroma

Karsa Karya Dewi Lestari Perspektif  
Ekologi Budaya', *Lingua Franca:  
Jurnal Bahasa, Sastra, dan  
Pengajarannya*, 4(1), pp. 106–120.  
doi:  
<https://doi.org/10.30651/lf.v4i1.2375>.